

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2015, serta Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta salam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari Visi, Misi, dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 12 (dua belas) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 merupakan tahun ke-3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 dan Renstra BPPKBPA Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai factor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Pada tahun 2015, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian tujuan diukur melalui 4 (empat) sasaran strategis mencakup masing-masing bidang capaian beserta berbagai programnya.

3. Dari analisis 4 (empat) sasaran, terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2015, 12 (dua belas) indikator dengan 10 (sepuluh) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 2 (dua) indikator belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai factor kendala.
4. Secara umum pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak pada tahun 2015 dapat dikategorikan berhasil.
5. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis, yaitu :
 - 1) Masih rendahnya pemahaman mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) serta kurangnya komitmen dalam menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
 - 2) Belum optimalnya pemanfaatan data terpilah dalam proses perencanaan dan evaluasi.
 - 3) Belum optimalnya peranan instansi yang terkait dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sehingga masih banyak pelanggaran tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat.
 - 4) Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antara BPPKBPA dengan BKKBN
6. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dirumuskan saran-saran sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat dengan sosialisai tentang penyusunan program dan kegiatan yang berbasis responsif gender bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
 - 2) Optimalisasi pengumpulan data terpilah yang diperoleh dari berbagai institusi terkait secara rutin dan direkap (dianalisa) sebagai acuan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- 3) Dalam upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi masyarakat dikarenakan luasnya jangkauan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan laporan maka dilakukan sosialisasi berkenaan dengan masalah dimaksud kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik dengan harapan timbulnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan tindakan pelanggaran yang terjadi dilingkungannya kepada instansi atau lembaga yang berwenang;
- 4) Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Keluarga Berencana di Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan koordinasi dan sinkronisasi program KB dengan BKKBN.

Sejumlah keberhasilan telah dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak. Sementara itu beberapa kelemahan, kekurangan, hambatan dan kendala yang dijumpai menjadi tantangan yang harus disikapi dengan bijaksana oleh semua pihak demi tercapainya cita-cita bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.